



Kementerian Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia



PENGUATAN IMPLEMENTASI RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

**Dr. Hariani Samal, S.Hut., M.Si.
Direktur PSDAB**

Jakarta, 17 Juli 2026

**DIREKTORAT PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN
DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA**

 kemenlh.go.id

 [kemenlh_bplh](https://www.instagram.com/kemenlh_bplh)

 [kemenlh_bplh](https://twitter.com/kemenlh_bplh)

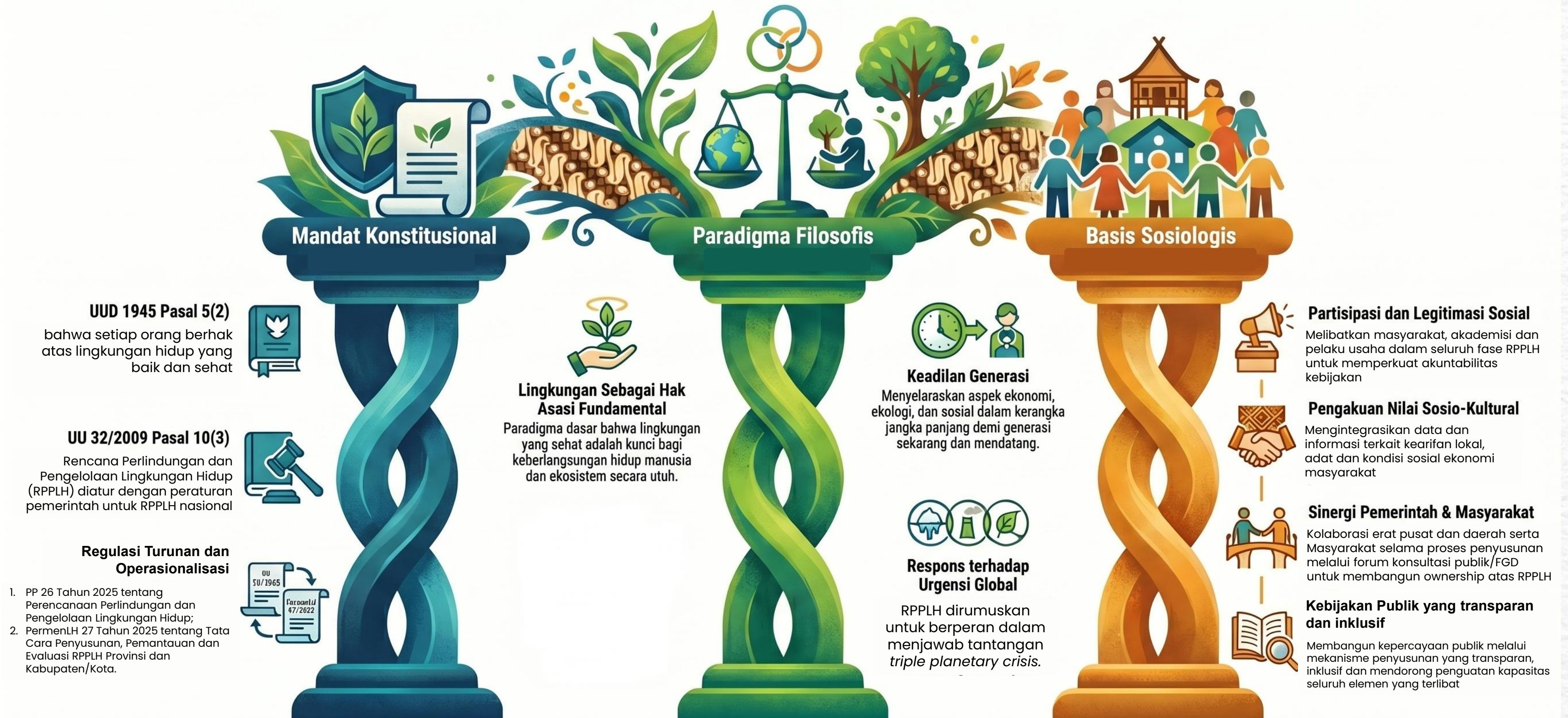
 [kemenlh_bplh](https://www.tiktok.com/@kemenlh_bplh)

 [KLH-BPLH](https://www.youtube.com/KLH-BPLH)

 [Kementerian LH](https://www.facebook.com/Kementerian.LH)



URGENSI KONSTITUSIONAL, FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS RPPLH



LANDASAN REGULASI TERKAIT RPPLH



Landasan hukum penyusunan RPPLH dimulai dari **UU No. 32 Tahun 2009**, khususnya **Bab III tentang Perencanaan**, yang kemudian dijabarkan dalam **PP No. 26 Tahun 2025** dengan RPPLH Nasional 2025-2055 ditetapkan dalam Lampiran III **PP No. 26 Tahun 2025**, sedangkan tata cara penyusunan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut melalui **Permen LH/Kepala BPLH No. 27 Tahun 2025**.

KONSEP RPPLH DALAM MENDORONG KELESTARIAN LANDSCAPE DAN SEASCAPE

INVENTARISASI LH BERBASIS EKOREGION



Data dan informasi karakteristik wilayah sesuai **ekoregion** sebagai basis perencanaan, yang tidak hanya terbatas pada batas administratif.

DDDTLH



Daya Dukung dan Daya Tampung LH (DDDTLH) menjadi informasi kunci dalam ambang batas ketersediaan dan kebutuhan lingkungan hidup.

RPPLH



RPPLH memuat arahan **kebijakan, strategi dan program indikatif yang ditetapkan melalui Perda**, sehingga berkekuatan hukum.

INSTRUMEN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP



Berbagai instrumen pengendalian untuk mitigasi dampak, di level KRP melalui **KLHS**, di level U/K melalui **Amdal**, pendayagunaan **Instrumen Ekonomi LH** dan instrumen lainnya.

KAWASAN HULU – DIDOMINASI OLEH PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI

DATARAN / PERTENGAHAN DARI LANSKAP – AREA TRANSISI KE AREA PRODUKSI DAN EKONOMI

AREA HILIR – PEMANFAATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



PRINSIP PENGELOLAAN LANDSCAPE



Integrasi Hulu-Hilir



Kolaborasi Multi Pihak



Keadilan Ekologis dan Sosial



Ketahanan Iklim dan Bencana

RPPLH menjadi instrumen kunci untuk memastikan pembangunan berjalan dalam batas daya dukung lingkungan, melindungi ekosistem kunci, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

OUTCOME: SDGs, NDC → KEDAULATAN LINGKUNGAN



Kegiatan Pembangunan Ramah Lingkungan



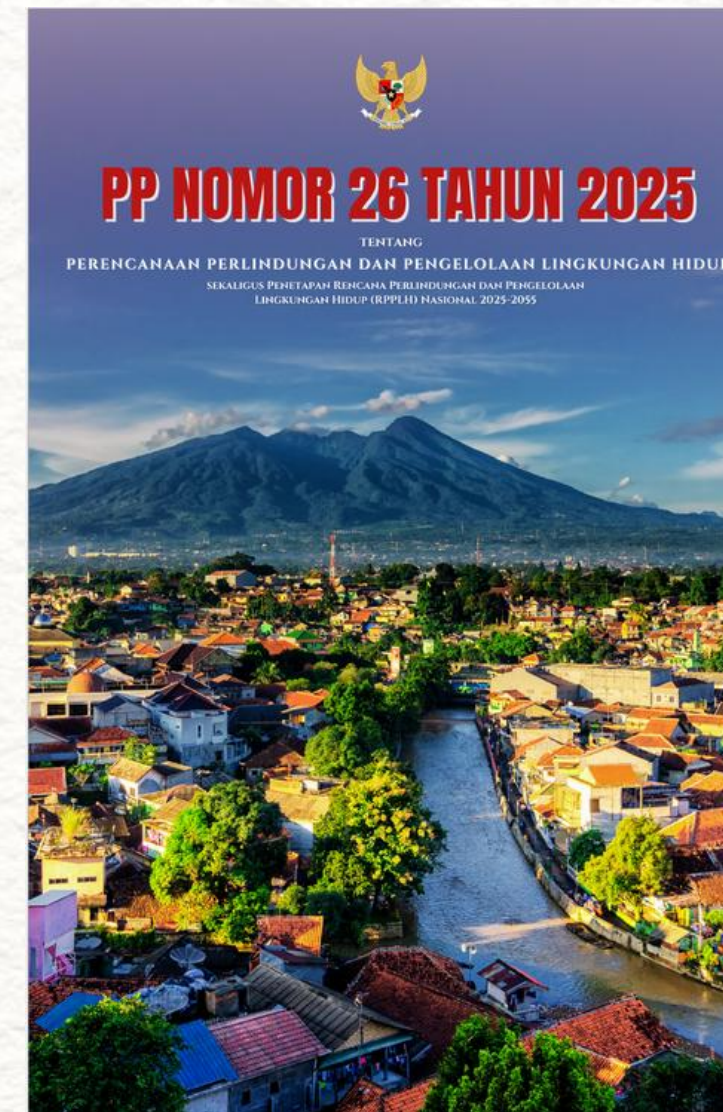
Kualitas LH yang baik dan Sehat



Kualitas Kehidupan yang baik (Sejahtera)

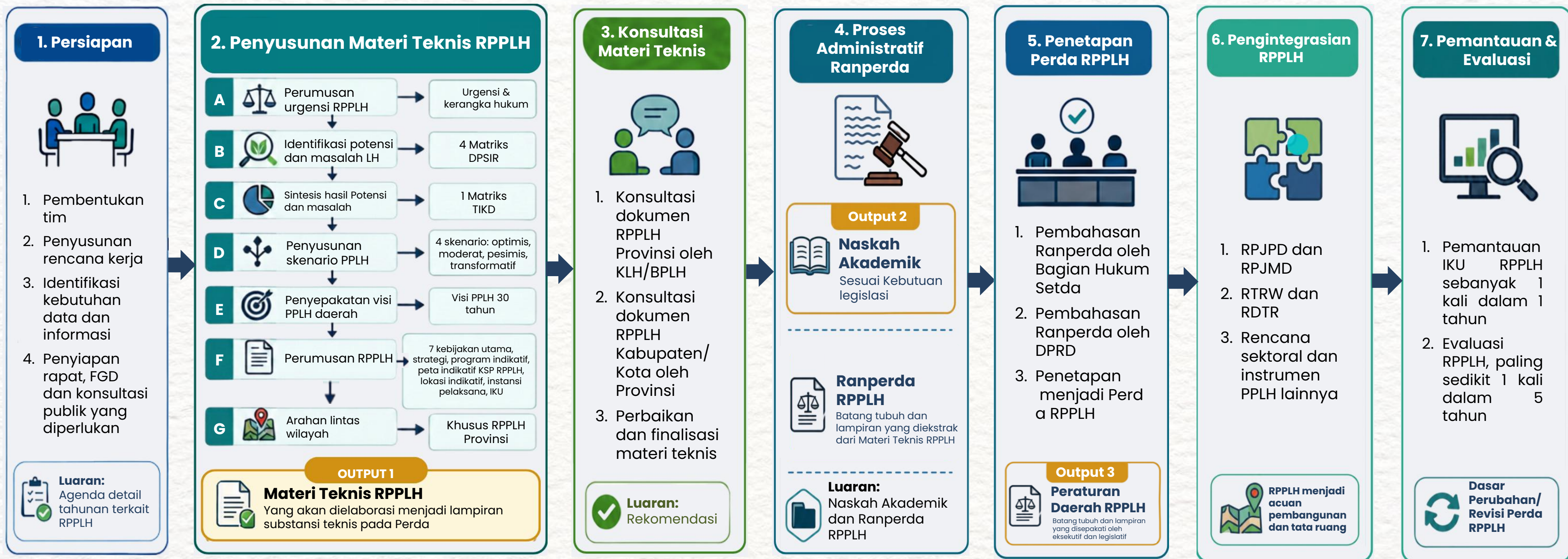
DEFINISI RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

- ✓ RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat **potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya** dalam kurun waktu tertentu.
- ✓ Muatan dalam RPPLH meliputi:
 - pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam.
 - pemeliharaan dan perlindungan terhadap kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup.
 - pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian sumber daya alam.
 - adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- ✓ RPPLH dirancang dengan jangka waktu perencanaan selama **30 tahun**, dan dilakukan **pemantauan** terhadap indikator kinerja utama RPPLH sebanyak **1 kali dalam 1 tahun**, serta **evaluasi** paling sedikit **1 kali dalam 5 tahun** untuk mengubah materi muatan RPPLH.
- ✓ Landasan **Regulasi**:
 - **Pasal 1, Pasal 10 ayat 3 huruf a, dan Pasal 11 UU 32/2009,**
 - **PP 26 Tahun 2025** tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - **PermenLH 27 Tahun 2025** tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota



SELAYANG PANDANG PENYELENGGARAAN

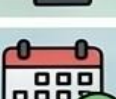
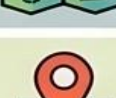
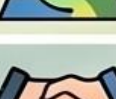
RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota



Penyelenggaraan RPPLH menghasilkan 3 Output Utama yaitu:

- 1) Materi Teknis RPPLH;
- 2) Naskah Akademik;
- 3) Peraturan Daerah RPPLH beserta lampirannya.

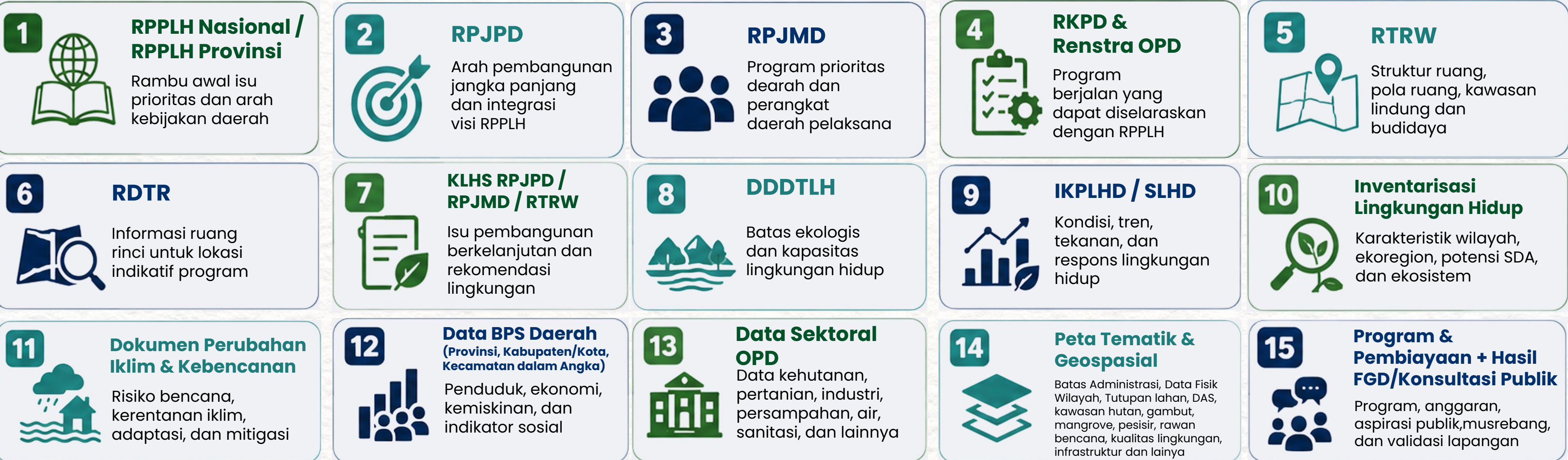
MANUAL PENYUSUNAN RPPLH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

KEGIATAN	INPUT	PROSES	OUTPUT	DIGUNAKAN UNTUK	PIHAK YANG TERLIBAT
 1. Perumusan Urgensi RPPLH	Regulasi terupdate, khususnya terkait Lingkungan Hidup dan Perencanaan Pembangunan	1. Peran dan fungsi RPPLH terhadap instrumen PPLH pada media lingkungan/ekosistem spesifik, perencanaan pembangunan dan sektoral 2. Kerangka hukum terkait RPPLH	1. Urgensi RPPLH 2. Kerangka Hukum	1. Bab I Materi Teknis 2. Penguatan Bab I, IV dari Naskah Akademik RPPLH	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten /Kota
 2. Identifikasi Potensi dan Masalah LH – DPSIR	RPPLH Nasional/Provinsi, hasil inventarisasi LH daerah, DDDTLH, SLHD, Data Sosial Ekonomi, RTRW, RPJPN/RPJPD, dan data lain yang relevan terkait RPPLH	Kerangka Berpikir DPSIR (4 Tema sesuai PermenLH 27/2025)	4 Matriks DPSIR dengan 4 Tema sesuai PermenLH 27/2025	1. Perumusan TIKD (Mandat PP 26/2025) 2. Bab II Materi Teknis RPPLH	1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten /Kota dan Perangkat Daerah terkait 2. Dapat melibatkan pakar baik akademisi atau konsultan penyusun bila diperlukan
 3. Perumusan Hasil Potensi dan Masalah LH	4 Matriks DPSIR (4 Tema sesuai PermenLH 27/2025)	1. Analisis keterkaitan antar tema DPSIR, penentuan prioritas tantangan, isu, kondisi dan dampak LH 2. Perumusan tantangan, isu, kondisi, dan dampak LH terpilih	TIKD (Tantangan, Isu, Kondisi, Dampak)	1. Dasar penyusunan skenario PPLH 2. Bab II Materi Teknis 3. Lampiran Perda RPPLH	1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten /Kota 2. Dapat melibatkan pakar baik akademisi atau konsultan penyusun bila diperlukan
 4. Penyusunan Skenario PPLH	TIKD (Tantangan LH – Isu LH – Kondisi LH – Dampak LH)	• Apabila menggunakan <i>foresight</i> , lakukan penelusuran secara holistik untuk menghasilkan 2 penggerak perubahan. • Matriks skenario 2x2 yang memuat 4 skenario PPLH	4 Skenario PPLH (Optimis, Moderat, Pesimis, Transformatif)	1. Penetapan Visi PPLH 2. Bab III Materi Teknis	1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten /Kota dan Perangkat Daerah terkait 2. Dapat melibatkan pakar baik akademisi atau konsultan penyusun bila diperlukan
 5. Penyepakatan Visi PPLH Daerah	4 Skenario PPLH (Optimis, Moderat, Pesimis, Transformatif)	Pemilihan skenario PPLH melalui pertimbangan akademisi, masyarakat sipil, Kepala Daerah, dan Pimpinan OPD	Visi PPLH 30 Th ke depan (Kondisi Lingkungan yang Diharapkan)	1. Perumusan Kebijakan RPPLH 2. Bab III Materi Teknis 3. Lampiran Perda RPPLH	1. Kepala Daerah 2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten /Kota dan Perangkat Daerah terkait 3. Dapat melibatkan pakar baik akademisi atau konsultan penyusun bila diperlukan
 6. Perumusan 7 Kebijakan Utama RPPLH	Visi RPPLH Tahun 2055 	Penjabaran visi sebagai arah PPLH 30 tahun ke depan yang terintegrasi dengan visi pada instrumen perencanaan lainnya	7 Kebijakan Utama RPPLH (sesuai PP 26/2025)	1. Perumusan Strategi RPPLH 2. Bab IV Materi Teknis 3. Lampiran Perda RPPLH	1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten /Kota dan Perangkat Daerah terkait 2. Dapat melibatkan pakar baik akademisi atau konsultan penyusun bila diperlukan
 7. Perumusan Strategi RPPLH	7 Kebijakan RPPLH Strategi RPPLH 	Perumusan strategi sesuai substansi RPPLH dari UU 32/2009 dan koridor pada PP 26/2025 dan PermenLH 27/2025	Strategi RPPLH	1. Penyusunan Program Indikatif 2. Bab IV Materi Teknis 3. Lampiran Perda RPPLH	1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten /Kota dan Perangkat Daerah terkait 2. Dapat melibatkan pakar baik akademisi atau konsultan penyusun bila diperlukan
 8. Perumusan Program Indikatif RPPLH	Program Indikatif RPPLH 	Penjabaran strategi menjadi program/kegiatan prioritas, target, dan tahapan waktu	Program Indikatif (Kegiatan Prioritas 30 Th ke depan) 	1. Penyusunan Peta Indikatif KSP RPPLH 2. Bab IV Materi Teknis 3. Lampiran Perda RPPLH	1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten /Kota dan Perangkat Daerah terkait 2. Dapat melibatkan pakar baik akademisi atau konsultan penyusun bila diperlukan
 9. Penyusunan Peta Indikatif KSP RPPLH	Program Indikatif 	Analisis spasial pada IGT seperti ekoregion, jasa lingkungan hidup, DDDTLH, ekosistem spesifik dan data pendukung lainnya	Peta Indikatif KSP RPPLH (Rambu Ekologis) 4 Arahkan Spasial Utama	1. Penguatan Lokasi Indikatif 2. Bab IV Materi Teknis 3. Lampiran Perda RPPLH	1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten /Kota dan Perangkat Daerah terkait 2. Dapat melibatkan pakar baik akademisi atau konsultan penyusun bila diperlukan
 10. Perumusan Lokasi Indikatif Program RPPLH	Peta Indikatif KSP RPPLH 	Penentuan wilayah prioritas berdasarkan kriteria urgensi, dampak, dan kelayakan 	Lokasi Indikatif (Wilayah Prioritas: Pulau/Prov/Kab/Kota)	1. Penetapan Instansi Pelaksana 2. Bab IV Materi Teknis 3. Lampiran Perda RPPLH	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten /Kota
 11. Perumusan Instansi Pelaksana	Program Indikatif + Lokasi Indikatif	Analisis kewenangan, kapasitas kelembagaan, dan sinergi antar pemangku kepentingan 	Instansi Pelaksana (Pusat, Provinsi, Kab/Kota, dan Pemangku Kepentingan)	1. Pemantauan dan Evaluasi serta Pembinaan Perda RPPLH 2. Bab IV Materi Teknis 3. Lampiran Perda RPPLH	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten /Kota
 12. Perumusan Arahkan Lintas Wilayah (RPPLH Provinsi)	Arahkan RPPLH Provinsi terhadap: 1. ekosistem lintas wilayah 2. pemanfaatan jasa lingkungan lintas daerah. 3. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Perumusan Matriks Arahkan (basisnya menggunakan ekoregion)	Matriks arahan RPPLH lintas wilayah untuk Kabupaten/Kota	1. Pembinaan Perda RPPLH Kabupaten/Kota 2. Bab V Materi Teknis 3. Lampiran Perda RPPLH	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten /Kota

 : Rapat Pembahasan setara FGD
(DISESUAIKAN DENGAN KEKUATAN ANGGARAN)

 : Konsultasi Publik
(DISESUAIKAN DENGAN KEKUATAN ANGGARAN)

DOKUMEN DAN DATA AWAL YANG DIPERLUKAN DALAM PENYUSUNAN RPPLH



HASIL CHECKLIST AWAL

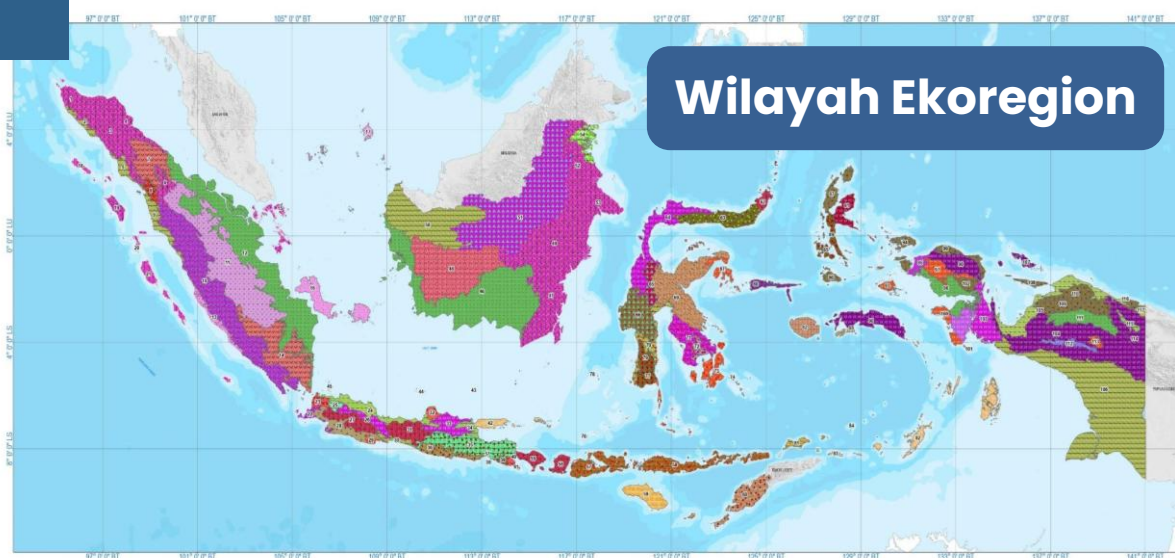


Catatan: Daerah tidak harus memulai dari kajian primer baru. RPPLH dapat disusun dari dokumen dan data yang sudah tersedia, lalu diperiksa kualitas dan relevansinya.

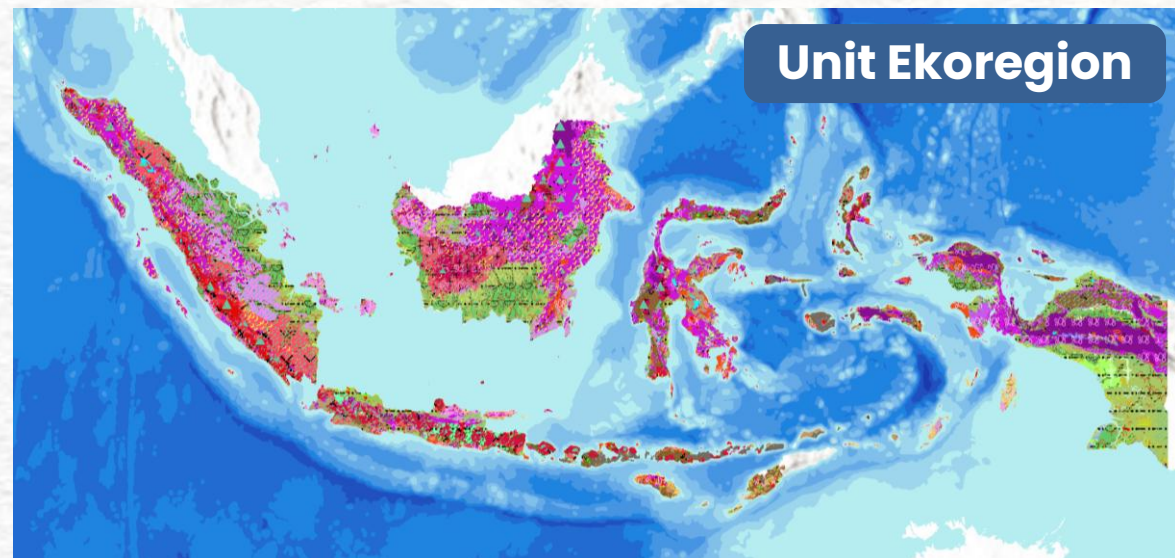


CUPLIKAN BEBERAPA DATA DAN INFORMASI YANG DIPERGUNAKAN DALAM RPPLH

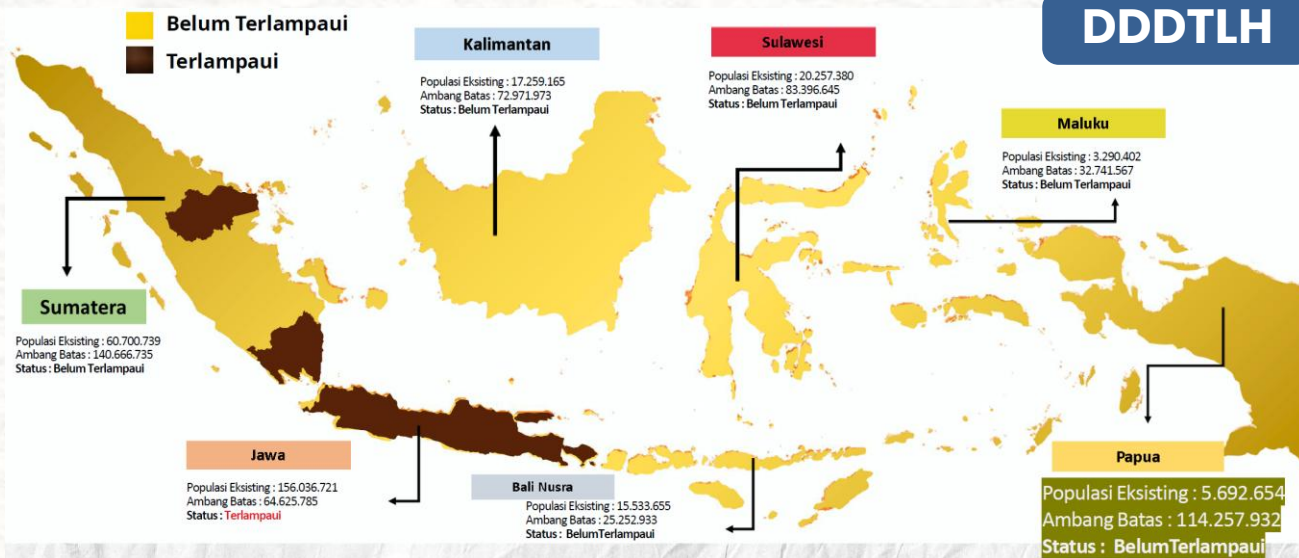
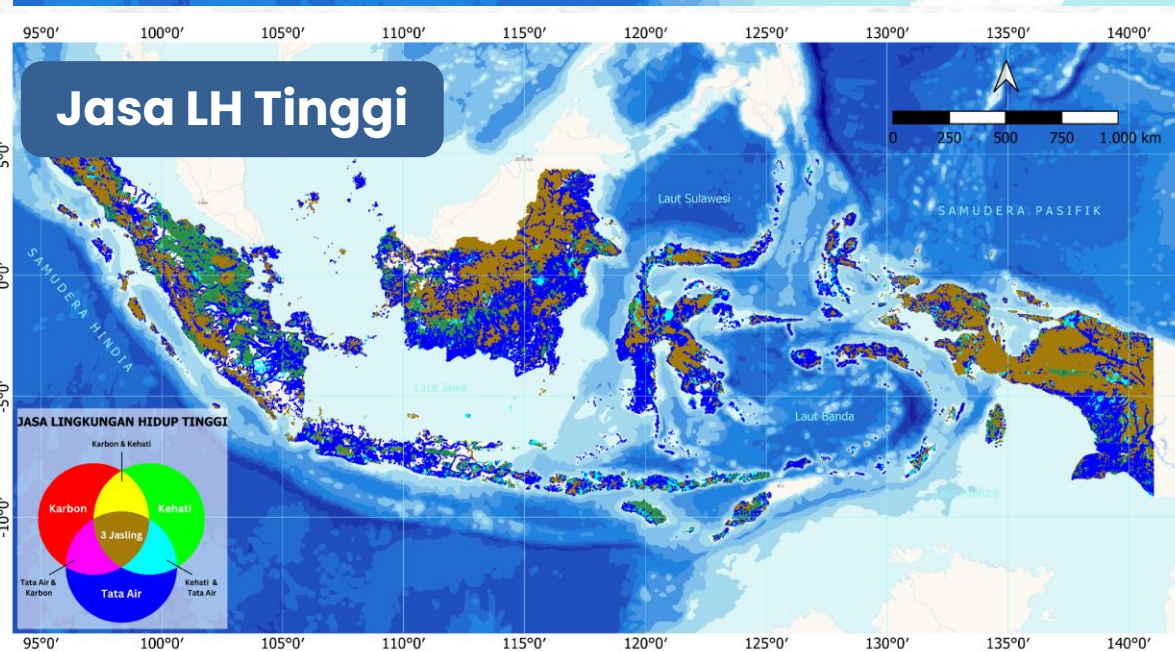
Wilayah Ekoregion



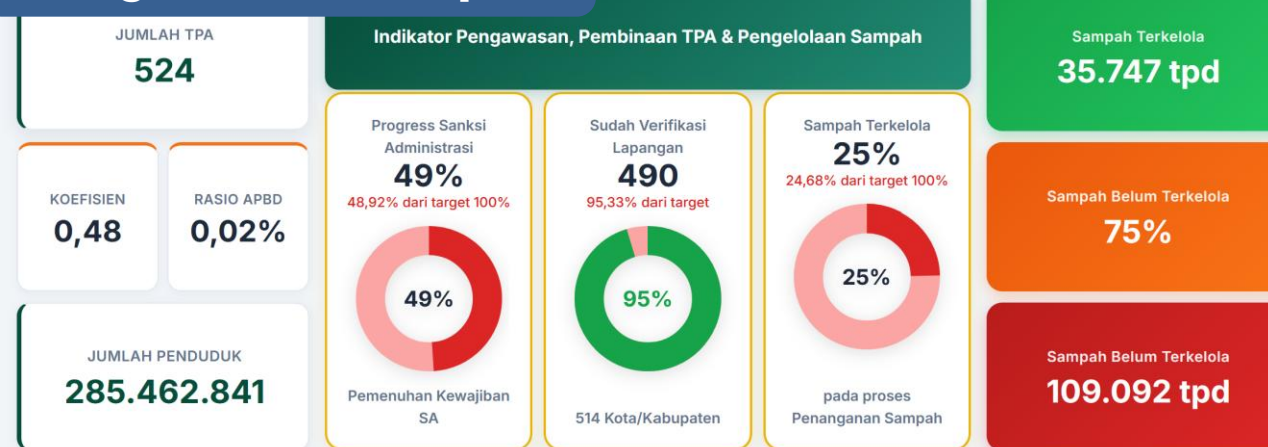
Unit Ekoregion



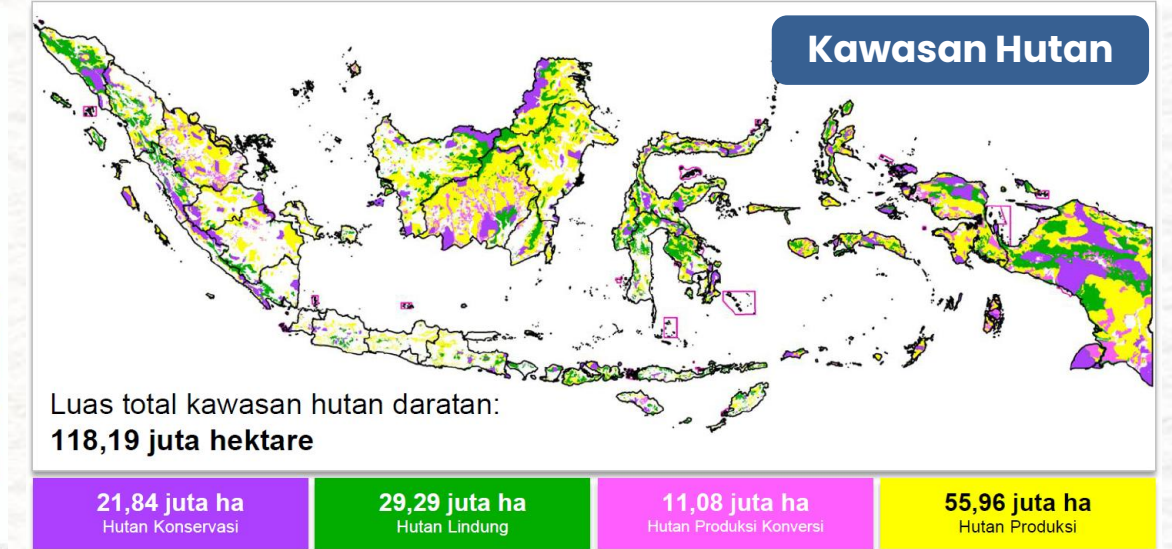
Jasa LH Tinggi



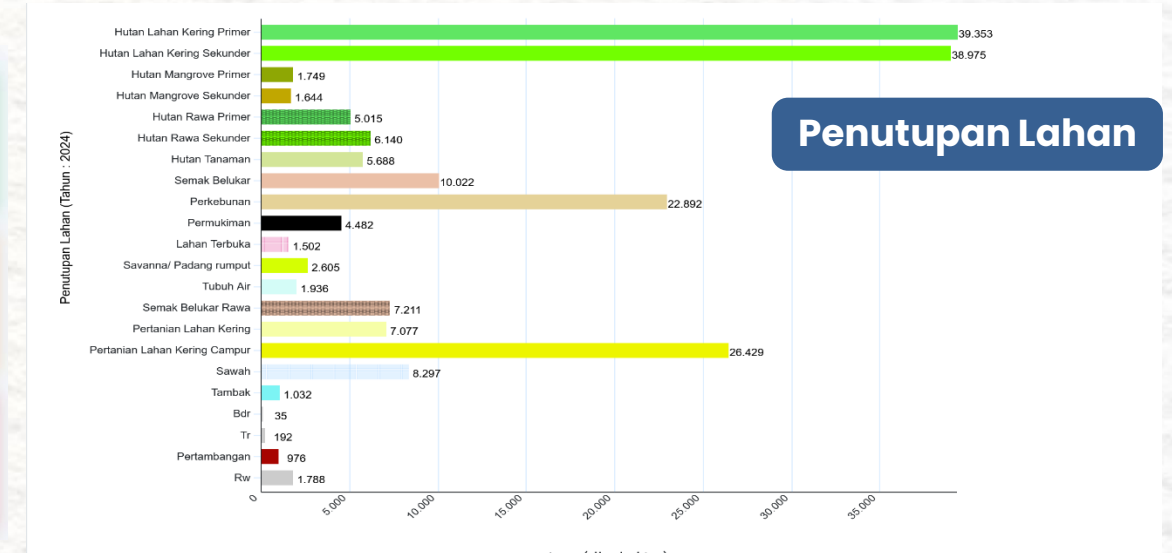
Pengelolaan Sampah



Kawasan Hutan



Penutupan Lahan



Tata Ruang



serta berbagai Data dan Informasi lainnya (Spasial dan Nonspasial)



CONTOH SUBSTANSI RPPLH NASIONAL DAN RPPLH DAERAH

ARAHAN NONSPASIAL RPPLH NASIONAL 2025–2055 (LAMPIRAN III PP 26 TAHUN 2025)

7 Kebijakan Utama;



Kebijakan 1. Perlindungan wilayah yang memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan dan kemampuan jasa lingkungan hidup tinggi



Kebijakan 2. Pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup



Kebijakan 3. Pemanfaatan wilayah dan sumber daya alamnya berdasarkan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup



Kebijakan 4. Pencadangan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam



Kebijakan 5. Pendayagunaan nilai tambah sumber daya alam di suatu wilayah



Kebijakan 6. Penerapan dekarbonisasi menuju *Net Zero Emission*



Kebijakan 7. Peningkatan ketahanan dan resiliensi dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana

141 Strategi, 301 Program Indikatif

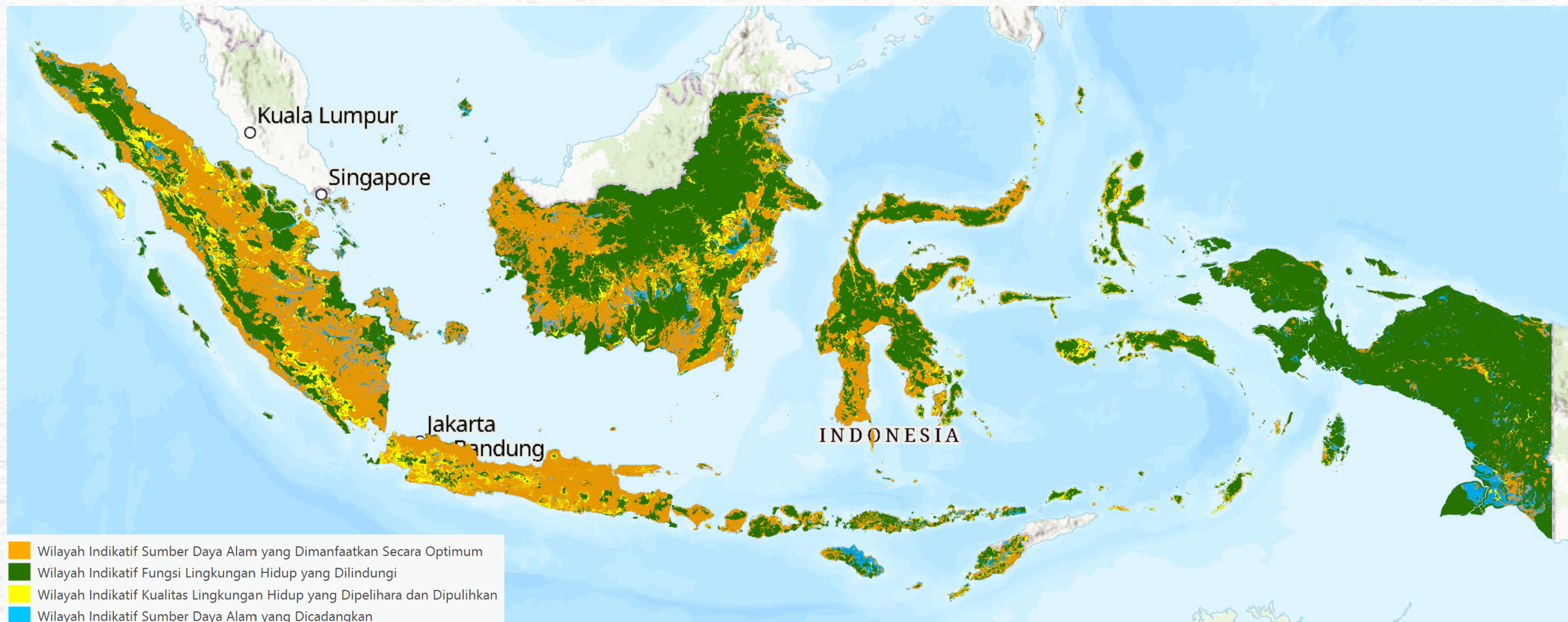
pada Lokasi Indikatif dengan Baseline 117 Wilayah Ekoregion

CONTOH MATRIKS KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM INDIKATIF RPPLH PULAU SUMATERA PADA LAMPIRAN III PP NOMOR 26 TAHUN 2025

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode			Lokasi Indikatif
			2030	2045	2055	
1. Perlindungan wilayah yang memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan dan kemampuan Jasa Lingkungan Hidup tinggi	1.1. Memperkuat tata kelola perlindungan kawasan dengan fungsi lindung	1.1.1. Penguatan tata kelola perlindungan kawasan konservasi	v			Kawasan lindung, dan konservasi, terutama pada wilayah Ekoregion Lahan Basah Pesisir Timur Andalas, Bukit Barisan Luhak Tujuh Talago, Dolok Sibolga-Tarutung, Dolok Hulu Asahan-Barumun, Luat Haminjon-Tao Toba, Dataran Singkil Barus, Bentang Pegunungan Gayo Leuser, Perbukitan Gampong Cut Nyak Dhien, dan Bentang Riau Kepulauan
		1.1.2. Penguatan kelembagaan perlindungan kawasan konservasi	v	v		
	1.2. Mengembangkan teknologi dan inovasi perlindungan wilayah	1.2.1. Pengembangan riset dan teknologi terkait perlindungan wilayah	v	v	v	

Sumber: Lampiran III PP Nomor 26 Tahun 2025

ARAHAN SPASIAL RPPLH NASIONAL 2025–2055 (LAMPIRAN III PP 26 TAHUN 2025)



33,88% untuk Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan secara optimum

55,41% untuk Fungsi LH yang dilindungi

6,92% untuk Kualitas LH yang dipelihara dan dipulihkan

3,78% untuk Sumber Daya Alam yang dicadangkan

Visualisasi ini **bukan Go/No-Go Area**, melainkan **arahan makro jangka panjang** berbasis **upaya PPLH**, dengan mengedepankan skema pembiayaan yang **menghindari cost center** dan **mendorong investasi jangka panjang yang berkelanjutan**.



RAMBU EKOLOGIS PETA INDIKATIF KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM RPPLH

4 Arahan dalam Peta Indikatif KSP RPPLH sebagai kompas ekologis



Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi
Area yang direkomendasikan untuk dilindungi, jika terdapat rencana pemanfaatan di area ini maka perlu mitigasi untuk mempertahankan fungsi ekosistem nya tetap terjaga.



Wilayah Indikatif Kualitas Lingkungan Hidup yang Dipelihara dan Dipulihkan
Area kritis yang perlu diperbaiki untuk mengembalikan fungsi ekologis sehingga bermanfaat untuk keberlangsungan sosial dan ekonomi Masyarakat.



Wilayah Indikatif Sumber Daya Alam Dicadangkan
Area potensial yang disimpan dan dikelola untuk jangka panjang.



Wilayah Indikatif Sumber Daya Alam yang Dimanfaatkan secara Optimum
Area pemanfaatan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dampak sosial, ekonomi dan lingkungan serta kecukupan kawasan lindung.

**peta ini adalah kompas ekologis, bukan peta peruntukan GO/NO GO AREA.*

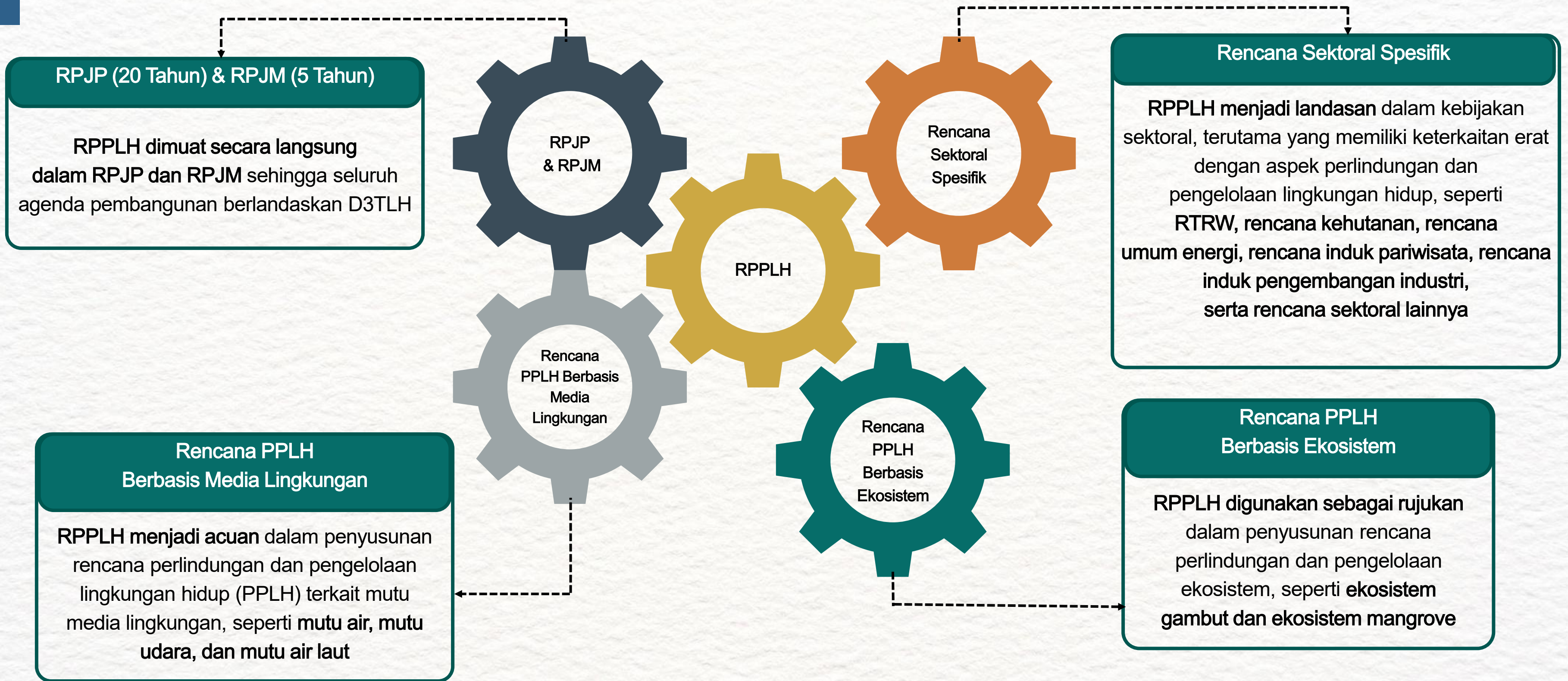
Arahan spasial RPPLH



- Wilayah Indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang Dilindungi
- Wilayah Indikatif Kualitas Lingkungan Hidup yang Dipelihara dan Dipulihkan
- Wilayah Indikatif Sumber Daya Alam yang Dicadangkan
- Wilayah Indikatif Sumber Daya Alam yang Dimanfaatkan Secara Optimum

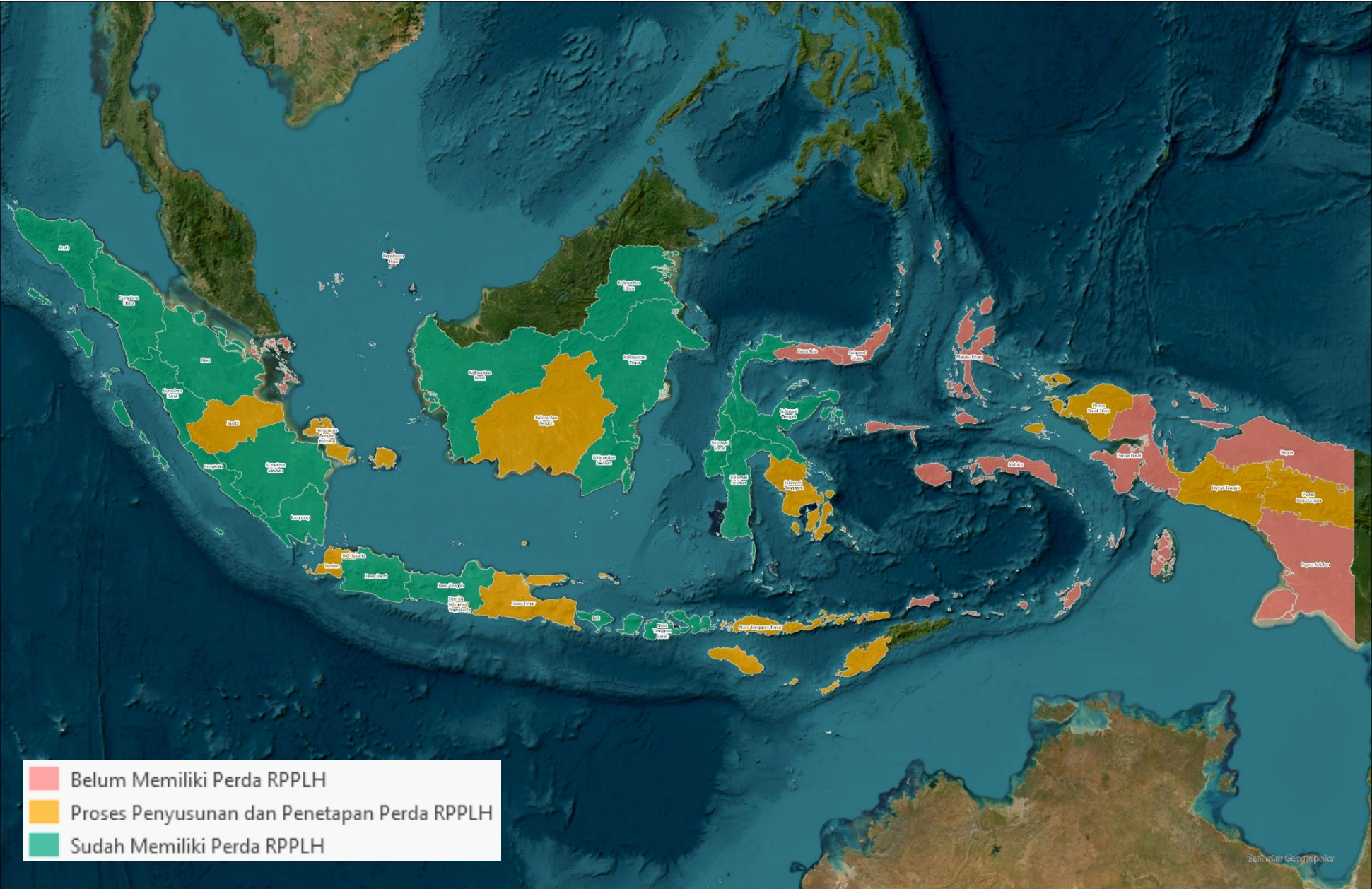
Arahan spasial RPPLH berfungsi sebagai penguatan dalam perumusan perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya di daerah, termasuk instrumen pengendaliannya jika diperlukan.

INTEGRASI RPPLH DENGAN INSTRUMEN LAINNYA



STATUS PERDA RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT PROVINSI

Data Per Juni 2026



Sumber: Dit. PSDAB, Deputi TLSDAB, KLH/BPLH

No.	Provinsi	Status Perda
1.	Kalimantan Selatan	Perda Nomor 2 Tahun 2017
2.	Kalimantan Barat	Perda Nomor 7 Tahun 2019
3.	Sumatera Barat	Perda Nomor 2 Tahun 2020
4.	Kalimantan Timur	Perda Nomor 2 Tahun 2020
5.	Sulawesi Tengah	Perda Nomor 5 Tahun 2021
6.	Sumatera Selatan	Perda Nomor 7 Tahun 2021
7.	Lampung	Perda Nomor 9 Tahun 2022
8.	Bengkulu	Perda Nomor 2 Tahun 2022
9.	Kalimantan Utara	Perda Nomor 4 Tahun 2022
10.	Sumatera Utara	Perda Nomor 11 Tahun 2023
11.	Jawa Barat	Perda Nomor 4 Tahun 2023
12.	Aceh	Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023
13.	Sulawesi Barat	Perda Nomor 1 Tahun 2024
14.	Jawa Tengah	Perda Nomor 1 Tahun 2024
15.	Nusa Tenggara Barat	Perda Nomor 4 Tahun 2024
16.	Riau	Perda Nomor 4 Tahun 2024
17.	Sulawesi Selatan	Perda Nomor 5 Tahun 2024
18.	Bali	Perda Nomor 7 Tahun 2025

Perda RPPLH tingkat Provinsi

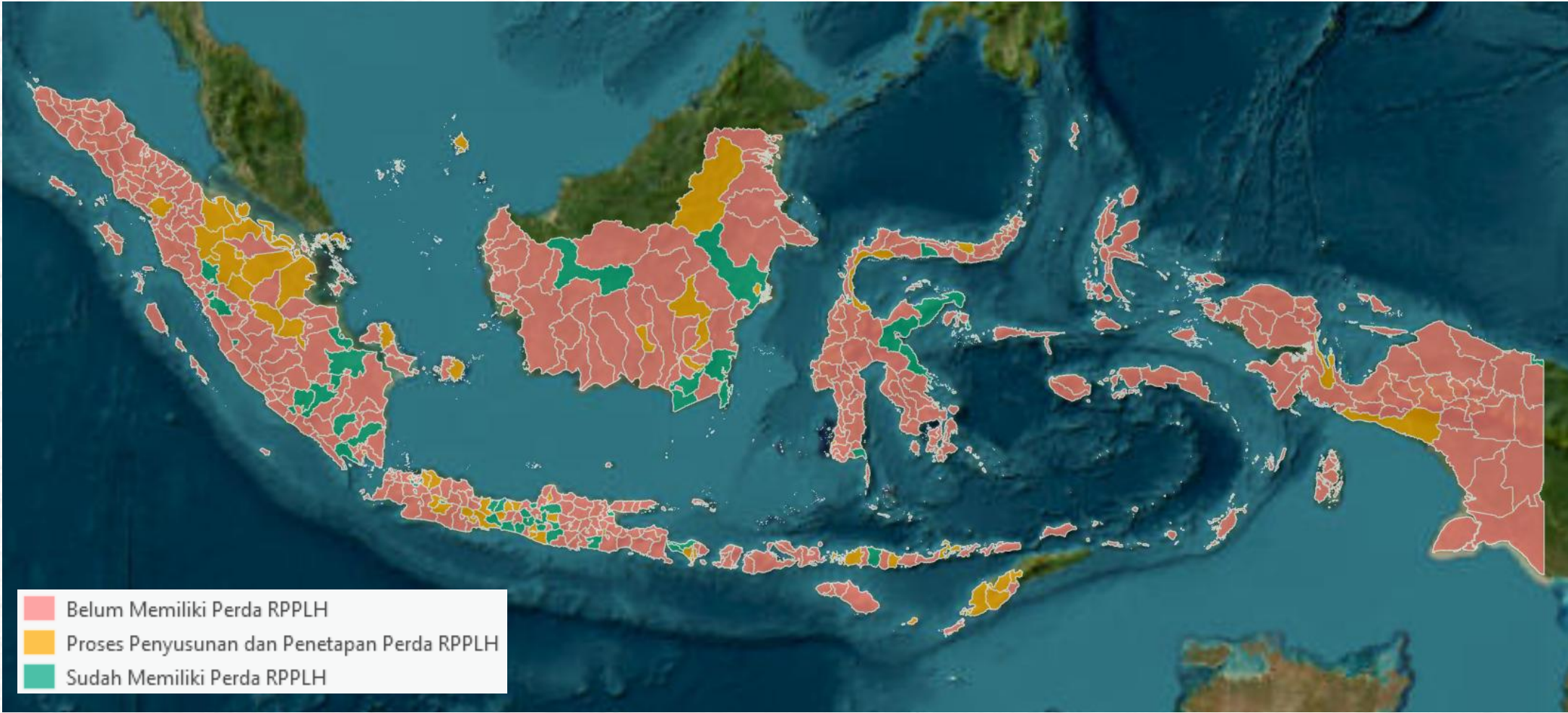
Sudah Perda : 18

Belum Perda : 8

Proses : 12

STATUS PERDA RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KAB/KOTA (1)

Data Per Juni 2026



Sumber: Dit. PSDAB, Deputi TLSDAB, KLH/BPLH

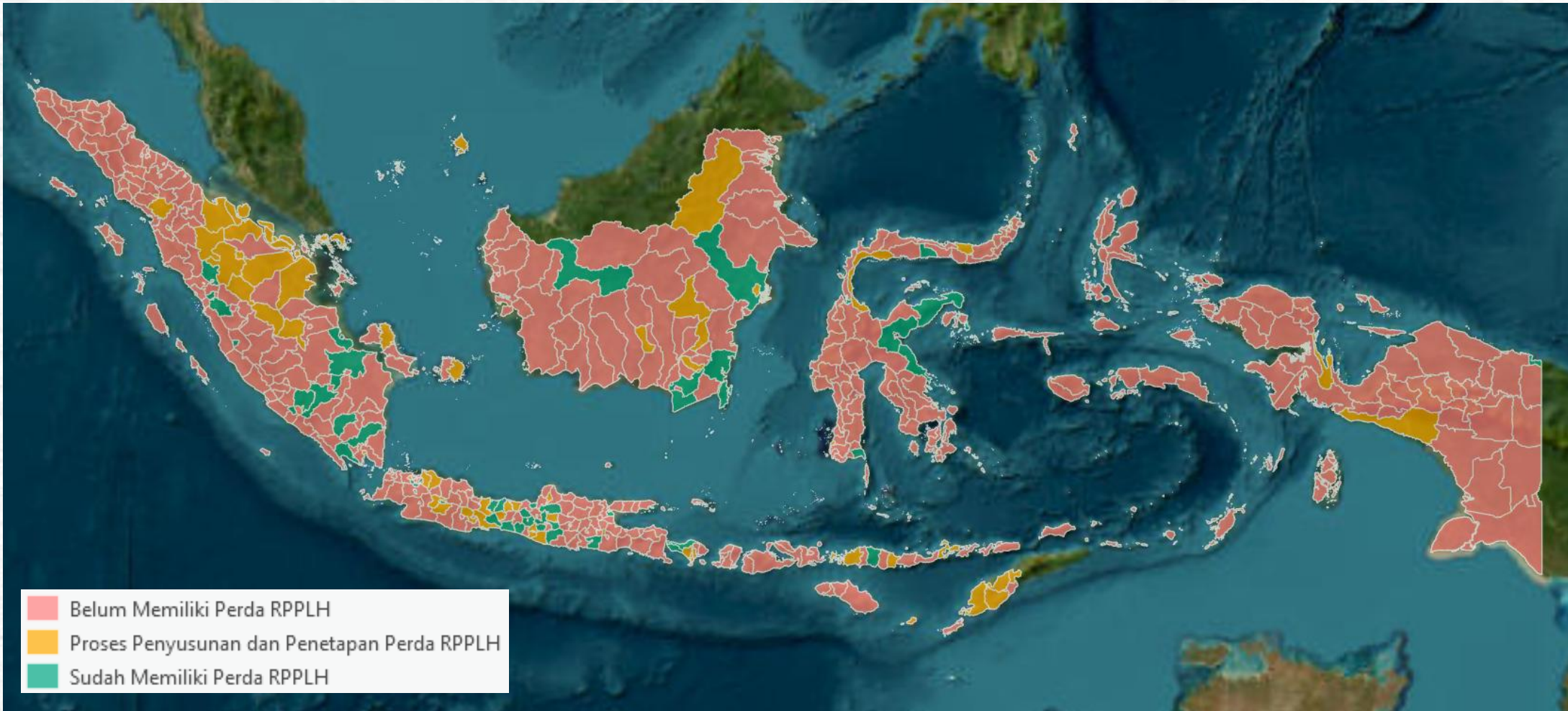
Perda RPPLH tingkat Kabupaten/Kota

Sudah Perda : 56
Belum Perda : 386
Proses : 66

No.	Provinsi	Status Perda
1.	Kota Depok	Perda Nomor 9 Tahun 2015
2.	Banjar	Perda Nomor 8 Tahun 2020
3.	Kota Cimahi	Perda Nomor 7 Tahun 2020
4.	Kota Bekasi	Perda Nomor 11 Tahun 2021
5.	Lampung Tengah	Perda Nomor 6 Tahun 2021
6.	Pemalang	Perda Nomor 9 Tahun 2021
7.	Kota Sungai Penuh	Perda Nomor 4 Tahun 2022
8.	Bogor	Perda Nomor 2 Tahun 2022
9.	Grobogan	Perda Nomor 3 Tahun 2022
10.	Tanah Laut	Perda Nomor 5 Tahun 2022
11.	Sintang	Perda Nomor 9 Tahun 2023
12.	Tanggamus	Perda Nomor 2 Tahun 2023
13.	Banyuasin	Perda Nomor 6 Tahun 2023
14.	Boyolali	Perda Nomor 17 Tahun 2023
15.	Buleleng	Perda Nomor 11 Tahun 2023
16.	Kota Jayapura	Perda Nomor 40 Tahun 2023
17.	Karanganyar	Perda Nomor 18 Tahun 2023
18.	Kebumen	Perda Nomor 14 Tahun 2023
19.	Kota Banjarmasin	Perda Nomor 8 Tahun 2023
20.	Kota Bogor	Perda Nomor 7 Tahun 2023
21.	Kota Palu	Perda Nomor 11 Tahun 2023
22.	Kota Pekalongan	Perda Nomor 9 Tahun 2023
23.	Kota Solok	Perda Nomor 5 Tahun 2023
24.	Kota Tegal	Perda Nomor 6 Tahun 2023
25.	Kotabaru	Perda Nomor 12 Tahun 2023
26.	Lahat	Perda Nomor 9 Tahun 2023
27.	Morowali	Perda Nomor 15 Tahun 2023
28.	Purworejo	Perda Nomor 8 Tahun 2023

STATUS PERDA RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KAB/KOTA (2)

Data Per Juni 2026



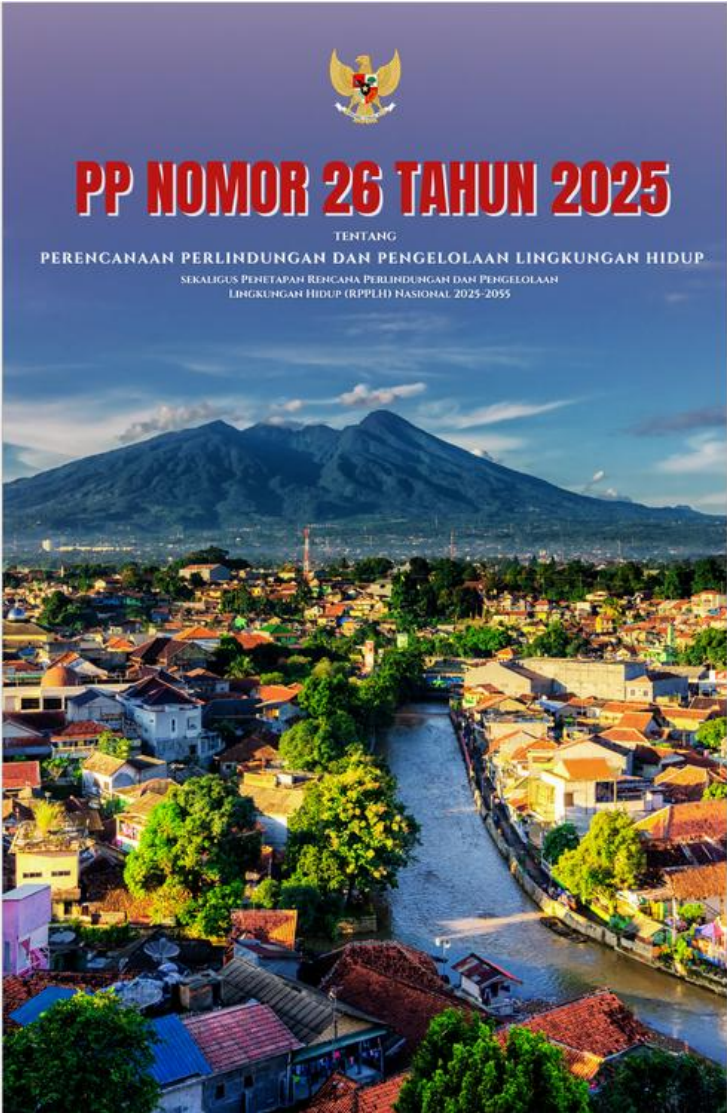
Sumber: Dit. PSDAB, Deputi TLSDAB, KLH/BPLH

Perda RPPLH tingkat Kabupaten/Kota

Sudah Perda : 56
Belum Perda : 386
Proses : 66

No.	Provinsi	Status Perda
29	Tegal	Perda Nomor 1 Tahun 2023
30	Wonogiri	Perda Nomor 2 Tahun 2023
31	Kota Tangerang Selatan	Perda Nomor 1 Tahun 2023
32	Morowali Utara	Perda Nomor 12 tahun 2024
33	Banggai	Perda Nomor 4 Tahun 2024
34	Banggai Laut	Perda Nomor 4 Tahun 2024
35	Banyumas	Perda Nomor 12 Tahun 2024
36	Blora	Perda Nomor 7 Tahun 2024
37	Bulukumba	Perda Nomor 7 Tahun 2024
38	Klaten	Perda Nomor 2 Tahun 2024
39	Kota Bandung	Perda Nomor 6 Tahun 2024
40	Kota Semarang	Perda Nomor 4 Tahun 2024
41	Kota Surakarta	Perda Nomor 1 Tahun 2024
42	Kota Tanjung Pinang	Perda Nomor 4 Tahun 2024
43	Lima Puluh Kota	Perda Nomor 3 Tahun 2024
44	Magelang	Perda Nomor 13 Tahun 2024
45	Muara Enim	Perda Nomor 13 Tahun 2024
46	Solok	Perda Nomor 2 Tahun 2024
47	Temanggung	Perda Nomor 2 Tahun 2024
48	Way Kanan	Perda Nomor 5 Tahun 2024
49	Wonosobo	Perda Nomor 8 Tahun 2024
50	Jembrana	Perda Nomor 6 Tahun 2025
51	Kota Sukabumi	Perda Nomor 1 Tahun 2025
52	Kota Pariaman	Perda Nomor 5 Tahun 2025
53	Kutai Kartanegara	Perda Nomor 4 Tahun 2025
54	Lembata	Perda Nomor 1 Tahun 2025
55	Manggarai Timur	Perda Nomor 1 Tahun 2025
56	Kota Surabaya	Perda Nomor 1 Tahun 2026

REGULASI TERKAIT RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



RPPLH Nasional 2025-2055 (Lampiran III)



Permen LH Nomor 27 Tahun 2025



Modul Penyusunan RPPLH (On Progress)

Terima Kasih!

DIREKTORAT PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN
DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

